

HUBUNGAN BISNIS INDONESIA-JEPANG: BERPUSAT PADA ASPEK KUALITATIF*

J. PANGLAYKIM

PENGANTAR

Hubungan bisnis antara Indonesia dan Jepang dapat diamati dari beberapa sudut pandangan yang berbeda. Dari sudut pandangan para ekonom, secara umum dapat diamati dari statistik perdagangan yang berkembang selama 10 tahun terakhir. Tetapi angka-angka ini terutama menunjukkan perkembangan dalam baik sektor impor dan ekspor maupun sektor investasi. Angka-angka lain sejauh mereka memperhatikan sektor jasa (perbankan, perkapalan, konsultasi, asuransi, hanya disebutkan beberapa) biasanya tidak banyak dikemukakan. Angka-angka penanaman modal asing biasanya dimasukkan, tetapi pada umumnya dibatasi dengan angka-angka yang berdasarkan penerapan formal dan pelaksanaan proyek-proyek investasi, mungkin dibagi ke dalam manufaktur dan lain-lain. Angka-angka lain, yang mungkin lebih besar dan lebih penting seperti yang meliputi berbagai jenis kredit untuk permesinan, perlengkapan, bahan mentah, dan lain-lain, umumnya tidak tersedia. Diketahui oleh banyak ekonom angka-angka investasi tidak hanya merupakan bagian dari investasi total di dan saluran dana ke Indonesia. Sebagai contoh, apabila suatu Sogo Shosha yang besar (atau perusahaan perdagangan besar) secara resmi sudah diinvestasikan US\$ 100 juta dalam sejumlah proyek, jumlah tersebut terlibat dalam bentuk-bentuk kegiatan lain, yang mungkin berhubungan dengan investasi-investasi ini dan bentuk-bentuk bisnis lainnya, dapat menjadi sepuluh kali lebih besar. Kita kemudian seharusnya dapat merasakan bagaimana besarnya jumlah yang terlibat dalam sektor investasi dan perdagangan. Bentuk-bentuk kegiatan lainnya seperti pemenang beberapa kontrak besar untuk konstruksi LNG, petro-kimia, Pertamina dan proyek-proyek pemerintah lainnya tidak termasuk dalam statistik resmi, tetapi

*Diterjemahkan dari makalah yang berjudul "Indonesia-Japan Business Relations: A Focus on the Qualitative Aspects," yang disampaikan dalam "Tenth Japan-Indonesia Colloquium," Kobe, Jepang, 20-22 September 1982. Diterjemahkan oleh Nancy K. SUHUT.

dalam pemerintahan Australia tetap mencurigai Indonesia dan beberapa unsur dalam pemerintahan Indonesia tidak melihat arti penting Australia maupun sebagai tetangga terdekat. Hubungan antara para politikus juga minim. Yang tampaknya menjengkelkan adalah kenyataan bahwa masalah-masalah mengenai Indonesia dan hubungan Indonesia-Australia sering dimanfaatkan para politikus Australia bagi konsumsi dalam negeri mereka.

Di kalangan akademikus kedua pihak masih terdapat prasangka, misalnya, mengenai mengenai kebijakan kulit putih Australia di masa lalu atau mengenai romantika Orde Lama di Indonesia. Prasangka di pihak media massa paling merusak. Sering dirasakan bahwa sikap "benar sendiri" pers Australia dalam menganalisa masalah-masalah Indonesia dan sikap acuh tak acuh pers Indonesia mengenai masalah-masalah Australia semakin menyulitkan usaha untuk secara bertahap menghapus prasangka tersebut.

Tinjauan singkat di atas mengenai keadaan hubungan di antara negara-negara mengisyaratkan bahwa sesuatu perlu dilakukan guna mengurangi kesalahpahaman di kedua pihak. Pertama-tama harus diakui adanya perbedaan-perbedaan dalam nilai dan kebiasaan masyarakat, sistem politik maupun tingkat perkembangan ekonomi. Sikap superior dan moralistis di pihak Australia sebagai negara yang lebih maju di bidang ekonomi tidak akan membantu membina pengertian dan kerja sama yang lebih luas. Pandangan-pandangan tentang Indonesia sebagai ekspansionis yang masih tersebar luas di Australia juga tidak membantu.

Demikian juga pihak Indonesia, khususnya para pemimpin, perlu secara bertahap mengatasi perasaan yang keliru terhadap Australia. Pengakuan yang lebih besar sebaiknya dikembangkan mengenai perlunya hidup berdampingan dan kerja sama dengan Australia sebagai tetangga penting Indonesia, khususnya karena semakin besarnya peranan kekuatan menengah seperti Australia dan Indonesia tampaknya diperlukan di masa mendatang dalam memelihara keamanan dan perdamaian dan kestabilan kawasan.

Lagipula langkah-langkah harus diambil untuk meningkatkan hubungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk sumber-sumber daya alam seperti batu bara dan bijih besi, serta juga kerja sama dalam bidang industri dan teknologi maju, termasuk dalam pertahanan. Kerja sama dan pertukaran dalam bidang pendidikan dan ilmu, yang telah dikembangkan untuk beberapa waktu, sebaiknya semakin didorong melalui cara yang lebih sistematis.

Hubungan yang lebih luas di kalangan media massa paling penting pada tahap ini. Kita seharusnya mengakui bahwa pers Australia paling bertanggung jawab atas memburuknya hubungan bilateral. Reaksi yang berlebih-lebihan di

Pertama, pendekatan "bipolar" tidak lagi cukup untuk memecahkan masalah-masalah yang besar di kawasan Asia-Pasifik, khususnya apabila masalah-masalah keamanan tidak hanya dilihat dari sudut militernya. Pemain-pemain semakin banyak, termasuk kekuatan-kekuatan politik baru seperti Cina, kekuatan-kekuatan ekonomi seperti Jepang, dan kekuatan-kekuatan menengah atau regional seperti Australia dan Indonesia. Oleh sebab itu pendekatan "multipolar" harus lebih ditekankan di masa mendatang.

Kedua, pendekatan militer saja tidak menjamin keamanan dan kestabilan kawasan. Sumber-sumber konflik di kawasan Asia-Pasifik lebih luas daripada sumber-sumber konflik di Eropa. Kecuali Semenanjung Korea, tidak terdapat garis-garis demarkasi konfrontasi-konfrontasi militer yang jelas. Lagipula, rumitnya masalah-masalah regional juga disebabkan oleh banyaknya pemain yang terlibat, yakni negara-negara sedang berkembang dan industri, super-power dan negara-negara mini, negara-negara dalam persekutuan Barat, negara-negara komunis, dan negara-negara Non-Blok. Dengan demikian masalah-masalah regional harus dihadapi dalam suatu kerangka yang lebih komprehensif dan melibatkan aspek-aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya sebagai tambahan aspek militernya.

Ketiga, ketidakstabilan di kawasan tidak semata-mata disebabkan oleh konflik superpower atau friksi di kalangan negara-negara besar, tetapi kemungkinan lebih besar oleh ketidakstabilan di dunia berkembang, yang pada gilirannya mengundang keterlibatan atau campur tangan Uni Soviet atau Cina yang bertujuan untuk membentuk suatu korelasi kekuatan-kekuatan prososialis yang lebih menguntungkan. Konflik-konflik lokal, seperti di Indocina atau Semenanjung Korea, juga merupakan sumber ketidakstabilan yang berbahaya di kawasan Asia-Pasifik.

Dengan demikian tidak diragukan bahwa kekuatan-kekuatan menengah, seperti Australia dan Indonesia, harus memainkan peranan yang lebih besar dalam memelihara keamanan dan kestabilan di kawasan Asia-Pasifik. Kita perlu meninjau bagaimana hubungan dan kerja sama antara Australia dan Indonesia dapat memberi sumbangan bagi pemeliharaan kestabilan regional. Sisi lain dari masalah yang sama adalah untuk mempersoalkan bagaimana memburuknya hubungan kedua negara bisa mengakibatkan ketidakstabilan regional.

Orientasi kebijakan luar negeri Australia dan Indonesia jelas berbeda karena pandangan dan filsafat mereka yang berbeda. Australia adalah suatu negara industri yang maju dan merupakan sekutu penting Amerika Serikat. Indonesia adalah suatu negara yang sedang berkembang dan menganut sikap Non-Blok dan independen. Namun mereka telah menunjukkan tujuan-tujuan